

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan dalam bidang kesehatan adalah salah satu bentuk nyata dari pelayanan publik. Kesehatan merupakan sebuah investasi bagi negara untuk melakukan pembangunan karena diperlukan sumber daya manusia yang sehat secara jasmani dan rohani untuk mewujudkan tujuan nasional. Penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pembangunan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu permasalahan kependudukan terbesar di era globalisasi yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah permasalahan kesehatan. Dampak dari permasalahan ini bukan hanya dihadapi oleh bangsa Indonesia, namun permasalahan kesehatan ini telah menjadi isu global mendunia.

Masalah kesehatan masyarakat Indonesia didasarkan pada dua aspek utama yaitu, aspek fisik seperti sarana kesehatan dan pengobatan penyakit, sedangkan yang kedua adalah aspek non fisik yang menyangkut masalah kesehatan itu sendiri. Masyarakat mengharapkan agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak memandang dari status sosial atau kelas tertentu. Fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki peran penting dalam mengelola pelayanan kesehatan di dalam masyarakat. Mengingat khususnya di daerah penyerahan urusan kesehatan menjadi kewenangan daerah, untuk itu Pemerintah Daerah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia memiliki Kebijakan Program Pembangunan yang telah dituangkan dalam Program NawaCita Presiden Joko Widodo yang memuat sembilan agenda pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2015-2019 dimana di dalamnya menyinggung persoalan kesehatan. Untuk mewujudkan NawaCita tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa program yang pro terhadap pembangunan Manusia diantaranya yaitu Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Sejahtera. Sektor Kesehatan merupakan salah satu dari sektor yang penting yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia selain dua sektor lain dalam nawacita yakni pendidikan dan sektor sosial.

Kepentingan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat oleh karena itu harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara dengan melalui berbagai sektor pelayanan, terutama pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pelaksanaan kesehatan di Indonesia sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia dalam perwujudan jaminan kesehatan bagi seluruh kalangan masyarakat.

Presiden Joko Widodo mempunyai visi dan misi untuk untuk mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong yang memiliki korelasi makna dengan poin ke-5 nawacita yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dengan itu dibentuklah suatu

program yang menjadi prioritas presiden Joko Widodo dalam pelayanan kesehatan oleh pemerintah upaya memberikan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau semua kalangan masyarakat Indonesia dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 08 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya dalam upaya penyempurnaan program JKN-KIS. Termaksud di dalam Inpres 8 tersebut, mandat dari Presiden Joko Widodo kepada 11 lembaga Negara untuk mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program JKN-KIS.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) dikeluarkan sebagai bentuk penyempurnaan dari program BPJS untuk merangkap seluruh masyarakat yang kurang mampu agar mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan diterapkannya Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) diharapkan tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena sebagian besar masyarakat di Indonesia lahir dari kalangan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang tentu saja rentan terhadap berbagai permasalahan kesehatan seperti terbatasnya akses untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Hal tersebut berdampak bagi kehidupan masyarakat itu sendiri karena rendahnya pengetahuan tentang berbagai gejala dan jenis penyakit, rendahnya kualitas lingkungan dan ketidakmerataan penyebaran tenaga kesehatan dan juga rendahnya kemampuan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan karena kendala biaya.

Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) didasarkan pada sistem rujukan seperti halnya BPJS yang menempatkan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, hal ini akan menjadi ancaman karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan mengakibatkan pelayanan kesehatan hanya terpusat di Rumah Sakit. Keterbatasan alat kesehatan dan kondisi Puskesmas yang tidak kondusif dalam menunjang pelayanan kesehatan maka akan menyebabkan pelayanan kesehatan tidak berjalan dengan baik dan tentunya akan berdampak pada kesuksesan penerapan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas.

Permasalahan lain dalam penerapan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yaitu terjadinya tumpang tindih dan dualisme pelayanan yang tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas primer puskesmas yakni adanya diskriminasi pelayanan kesehatan seperti yang terjadi di beberapa Puskesmas di daerah Jawa Timur yang memprioritaskan pelayanan pasien dari status sosial atau kelas tertentu. Tidak hanya itu, banyaknya kesalahan pencantuman identitas ataupun pemalsuan peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) mengakibatkan pihak Puskesmas menolak banyak peserta yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Puskesmas menjadi fasilitas kesehatan masyarakat yang memiliki peran penting dan apabila puskesmas tidak mampu menangani pelayanan kesehatan dengan maksimal tentu akan merugikan pihak rumah sakit karena rujukan yang menumpuk dan menimbulkan diskriminasi pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama maka diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kesehatan untuk seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial. Dimana para petugas atau tenaga kesehatan Puskesmas mempunyai peran dan tanggungjawab yang besar dalam menangani masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penerapan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) tentunya akan berjalan maksimal jika diiringi dengan kesiapan Puskesmasnya itu sendiri baik secara sarana maupun prasarana yang memadai.

Kurangnya pengetahuan peserta tentang program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak memahami alur rujukan, kurang cepatnya pengolahan data peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena tidak menggunakan Teknologi Informatika, jarak rumah beberapa peserta KIS ke Puskesmas yang terlalu jauh, serta kurang maksimalnya penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Puskesmas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian untuk mencari pokok permasalahan terkait penerapan Program kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas Pamotan Kecamatan Dampit. Adapun judul yang peneliti angkat ialah ***“Program Kartu Indonesia Sehat Dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pamotan

2. Bagaimana Fasilitas Kesehatan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas Pamotan Kecamatan Dampit.
3. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas Kecamatan Dampit.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Bagaimana Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Pamotan
2. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Fasilitas Kesehatan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Puskesmas Pamotan Kecamatan Dampit.
3. Untuk menggambarkan factor penghambat Implementasi Program kartu Indonesia Sehat (KIS) Di Puskesmas Pamotan Kecamatan Dampit.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat yang di dapat antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, dan sistematis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam karya ilmiah di bidang ilmu administrasi publik khususnya berkaitan dengan Implementasi Pelayanan Publik.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna bagi instansi terkait memberikan pelayanan yang baik bagi pemegang KIS sesuai dengan tugas dan fungsinya.